**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

FORM

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG**

**REGISTER RISIKO**

Tujuan : Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani di bidang komunikasi dan informasi

Sasaran : Meningkatnya kualitas dan manajemen pelayanan publik berbasis data dan informasi serta TIK dalam rangka *Smart City*

Program : Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Sub Bid : Statistik Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sub Kegiatan** | | **Risiko** | | **Penyebab** | **C/UC** | **Dampak Risiko** | **Pengendalian yang ada** | **Level Resiko** | | | | **Rencana Pengendalian Lanjutan** | **Target Waktu** | **Risk Owner** |
| **Nama** | **Tujuan** | **Kode** | **Pernyataan Risiko** |  | **K** | **D** | **Skor** | **Kategori** |  |  |  |
| 1. | Koordinasi & Sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, Analisa & diseminasi Data Statistik Sektoral | Terintegrasinya program kebijakan nasional di daerah melalui ketersediaan data yang akurat, terpadu, akuntabel, mudah diakses dan dibagipakaikan. |  | Tidak terakomodirnya program kebijakan nasional ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan ketersediaan anggaran  - Tidak tersedianya data yg akurat, akuntabel & terstruktur dalam mendukung program kebiiakan nasional | • Tidak ada koordinasi & sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan data untuk memenuhi program kebijakan nasional  • Tidak terintegrasinya data sektoral antar OPD di daerah sampai ke Kementerian maupun Pusat    • Banyak data yang tumpang tindih |  | - Perencanaan & perumusan kebijakan pembangunan tidak berbasis data yg akurat  - Tata Kelola Data yg buruk  - Tidak ada keterbukaan & transparansi data  - Program prioritas Nasional akan tidak tepat sasaran, tidak efektif dan efisien | * Membangun Portal Satu Data yang terintegrasi denganprov dan pusat * Menyusun NSPK Penyelenggaraan Statistik Sektoral * Menyusun pedoman dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis serta diseminasi data |  |  |  |  | * Mengembangkan Semarang Satu Data sebagai Portal Data Kota Semarang; * Melaksanakan monitoring ketersediaan data data; * Melaksanakan survey dalam rangka pengumpulan data sektoral | 1 tahun |  |
| 2. | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Untuk menghasilkan SDM yang handal & berkompeten dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral |  | * Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak tepat & efektif karena tidak berdasarkan data yang akurat, update & akuntabel * Data yang dikumpulkan, diolah, dianalisis dan disajikan tdk sesuai dengan standar data statistik * Informasi yang disajikan tidak tepat sasaran & dapat menimbulkan pengertian yg bias | * Tidak adanya SDM yang mampu mengolah, menganalisis & menyajikan data yang berkualitas; * Data & infomasi yang disajikan tidak sesuai dengan standar data statistik maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku | UC | * Data yang dikumpulkan, diolah, dianalisis dan disajikan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan; * Informasi yang disajikan tidak tepat sasaran & dapat menimbulkan pengertian yg bias | 1. Menambah jumlah ASN yang berkompeten di bidang statistik & pranata computer;  2. Menetapkan jabatan fungsional statistisi sebagai pengelola data,  3. Menyusun draft SOP dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 3 | 3 | 9 | Tinggi | * Menempatkan tenaga statistisi dan pranata komputer di OPD; * Memberikan pelatihan dan atau kursus tentang pengelolaan data statistic sektoral * Melakukan sosialisasi tentang standar data statistik & metadata statistik; * Memberikan Bimtek tentang analisis & penyajian data statistik * Memberikan reward pada pengelola data | 1 tahun |  |
| 3. | Membangun Metadata Statistik Sektoral | * Terwujudnya data & informasi yg terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya membuat, m**e**njadikan suatu data atau informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola; * Terhindarnya kesalahan dalam menginterpretasi-kan data atau informasi. |  | * Data & Informasi yang disajikan tidak terstruktur, sehingga menyulitkan pengguna dalam memahami data * Data & informasi yang dihasilkan tidak tersimpan dalam sistem infomasi yang terorganisir dengan baik; * Pengguna sulit untuk menemukan, menggunakan maupun mengolah data kembali | Tidak adanya metadata statistik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap data yang dihasilkan |  | * Menimbulkan kesalahan dalam menginterpretasikan data; * Menimbulkan duplikasi kegiatan yang dapat berakinbat pada pemborosan anggaran; * Menimbulkan kesalahan dalam penyampaian data & informasi | * Membuat/menyusun instrumen Metadata Statistik meliputi Metadata Variabel, Metadata Indikator & Metadata Kegiatan pada setiap data sektoral yang dihasilkan; * Megembangkan Sistem Metadata yang mengacu pada standar nasional/internasional; * Memberikan pelatihan, * sosialisasi & bimtek tentang Metadata Sttistik |  |  |  |  | - Menyelengga-rakan sosialisasi pelatihan & bimtek tentang Sistem Metadata Statistik;  - Menyusun & berkoordinasi dengan OPD terkait metadata statistik untuk data2 yang baru |  |  |
| 4. | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | * Tewujudnya pengelolaan data secara terintegrasi * Terlaksananya pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungja-wabkan |  | * Data yang dihasilkan tidak terstandar, banyak tersimpan di masing-masing OPD serta masih banyak yang tumpang tindih; * Data tidak berkualitas dan sulit dibagipakaikan; * Data yg tersimpan tidak dalam format khusus, karena tdk memiliki struktur yang spesifik | * Kurangnya pedoman dalam pengelolaan data statistik sektoral; * Belum ada kebijakan yang mendukung dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral; * Belum adanya pedoman dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis serta penyajian data statistik sektoral; |  | * Belum tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungja-wabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi; * Menghasilkan perencanaan pembangunan yang tidak terukur & komprehensif; * Analisis kebijakan pembangunan dibuat tidak berdasarkan pada data yang akurat; * Sulit mengakses data pemerintah; * Tidak ada keterbukaan dan transparansi data. | * Menetapkan Peraturan Daerah/Walikota tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral & Pengelolaan Data & Informasi Statistik; * Memperkuat tugas dan fungsi Wali data pendukung * Membentuk Forum Satu Data. |  |  |  |  | * Melaksanakan Bintek Pengelolaan Data Sektoral * Menyusun Pedoman Penyelenggaraan Statistik sektoral & Pengelolaan Data & Informasi Statistik; * Menetapkan NSPK (norma, Standar, Prosedur & Kriteria) dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral; * Membentuk Forum Walidata Pendukung |  |  |
| 5. | Pengembangan Infrastruktur | * Terpenuhinya sarana prasarana dalam pengelolaan data statistik sektoral; * Terwujudnya tata kelola data secara terintegrasi yang didukung oleh teknologi & ilmu pengetahuan yg mutakhir. |  | * Fungsi statistik sektoral dalam menyediakan data base pembangunan tdk terlaksana; * Data & informasi yg dihasilkan kurang update,efisien, tidak tepat waktu & sasaran. | * Belum tersedianya infrastruktur statistik yang mendukung pelaksanaan tugas & fungsi statistik sektoral; |  | * Data & informasi statistik sektoral yg dihasilkan tidak dapat terintegrasi baik antar OPD maupun dengan pemprov & pusat; * Tidak mempunyai Sistem yang mendukung utk membangun data base pembangunan | * Membangun database melalui Portal Semarang Satu Data |  |  |  |  | * Membangun media komunikasi data statistik sektoral; * Membentuk komunitas masyarakat cinta statistik; * Membuat sarana pelayanan data statistik yang berbasis teknologi modern & berkelanjutan |  |  |
| 6. | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | - Terlaksananya tugas & fungsi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral  -Terpadunya perencanaan, pelaksanaan, & pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai pusat berdasarkan data yang akurat & dapat dipertang-gungjawabkan |  | * Gagalnya pembangunan database dan integrasi data ke Sistem Informasi pembangunan Daerah (SIPD); * Tidak terbentuknya OPD yg dpt menjadi satu-satunya sumber data dan informasi statistik sektoral bagi kebutuhan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah | * Tidak tersediaanya data statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS sehingga menghasilkan data yang tidak berkualitas, akurat, lengkap, dan *timely* (*update*); * Tidak terlaksananya mekanisme dan prosedur dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data |  | * Perencanaan pembangunan daerah yg dilaksanakan tidak didasarkan atas hasil pengelolaan data yang berkualtas; * Tidak adanya pemahaman tentang pentingnya data statistik berkaitan dengan perencanaan dan pengambilan keputusan | * Membuat kebijakan tentang penyelenggaraan statisti sektoral; * Bekerja sama dengan BPS dalam menghasilkan data & sumber daya manusia yg berkualitas. |  |  |  |  | * Menyelenggarakan FGD, seminar, sosialisasi dalam rangka menentukan substansi,metodologi & konsep penyediaan dat sektoral; * Meningkatkan komitmen antar OPD dalam penyediaan data sektoral; * Membentuk media **data dan informasi** dan media **advokasi kebijakan** untuk pemanfaatan data yg berkualitas bagi perencanaan pembangunan. |  |  |